

## **BAB II**

### **AFRIKA SELATAN MASA APARTHEID (1948- 1994)**

Republik Afrika Selatan atau Uni Afrika Selatan adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan.

Afrika Selatan merupakan sebuah negara yang kaya dengan bahan tambang bernilai seperti emas, platinum dan berlian. Bahan tambang lainnya, kromium, antimoni, arang, biji besi, manganese, nikel, fosfat, biji timah, uranium, berlian, platinum, kuprum, vanadium, garam, gas asli.

Afrika Selatan terdiri dari sembilan provinsi yaitu: Eastern Cape Free State Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo Mpumalanga North West Northern Cape Western Cape. Kota-kota utama di Afrika Selatan termasuk Johannesburg, Durban, Cape Town, Pretoria, Kimberley, Port Elizabeth dan Bloemfontein. Afrika Selatan mempunyai iklim yang berbeda-beda. Di barat daya negara ini, iklimnya adalah Mediterania, di kawasan pedalaman ia beriklim sederhana, dan di timur laut iklimnya adalah subtropis. Afrika Selatan juga merupakan negara dengan berbagai macam bangsa dan mempunyai 11 bahasa resmi.

Ada empat kumpulan utama demografi di Afrika Selatan yaitu: orang kulit hitam, orang kulit putih, orang berwarna (orang dari Asia atau berdarah campuran) dan orang berbangsa India. Kaum yang terbesar di Afrika Selatan adalah kaum pribumi berkulit hitam yaitu 77% jumlah penduduk di sini. Penduduk kulit hitam terdiri dari masyarakat majemuk yang dapat diklasifikasikan kepada empat kelompok etnis berdasarkan kepada bahasa masing-masing. Kelompok yang terbesar yaitu 50% penduduk Afrika di sini adalah yang berbahasa Nguni termasuk bangsa Ndebele, Swazi, Xhosa dan Zulu. Kelompok yang kedua terbesar adalah yang berbahasa Sotho-Tswana, termasuk beberapa bangsa Sotho, Pedi, dan Tswana dan merupakan mayoritas di kebanyakan kawasan Highveld. Dua kelompok yang terakhir adalah Tsonga, atau Shangaan, yang tertumpu di Utara dan wilayah Mpumalanga, dan Venda, yang juga tertumpu di wilayah utara Afrika Selatan.<sup>19</sup> Kaum kulit putih terdiri dari 11% penduduk, yang berbangsa Belanda, Perancis, Inggris dan Jerman. Kebanyakan orang Eropa di negara ini adalah keturunan penjelajah-penjelajah awal di koloni Cape.

Kondisi dalam negeri Afrika Selatan selama terjadi perang antar ras semasa politik Apartheid dijalankan, mengakibatkan berkurangnya pengakuan Internasional akan Afrika Selatan, dengan indikasi investor asing tidak lagi mau menanamkan modalnya di negara tersebut selama kondisi dalam negeri Afrika Selatan terus dilanda

---

<sup>19</sup>Afrika Selatan. From. [http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan) 1 November 2008

konflik antar ras. Bahkan embargo ekonomi PBB, semakin melemahkan posisi Afrika Selatan di kancah internasional.

#### **A. Sejarah Politik Apartheid di Afrika Selatan**

Sebelum bangsa Eropa datang ke Afrika Selatan, publik belum banyak tahu tentang Negara di Benua Afrika bagian selatan. Pelaut Portugis bernama Bartolomeus Diaz, singgah di Tanjung Harapan ( Cape Town). Namun bukan berarti orang-orang berkebangsaan portugis yang banyak bermukim di sana, namun justru orang-orang Belanda lah yang kemudian paling banyak bermukim di Afrika Selatan, orang-orang inilah yang kemudian dikenal dengan julukan *Afrikaner*.

Orang-orang Inggris baru berhasil datang ke Cape Town pada tahun 1795 dengan membantu penduduk asli menghadapi konflik dengan VOC, hal ini lah yang menyebabkan sebagian wilayah Cape Town berhasil dikuasai Inggris. Kekuasaan Inggris di Cape Town semakin bertambah, dengan ditandai banyaknya orang-orang Inggris dan Skotlandia yang bermigrasi ke Afrika Selatan pada tahun 1820-1830an. Orang Afrika Selatan yang mayoritas berkulit gelap pun akhirnya merasa terganggu, sampai akhirnya terjadi ketegangan. Orang Belanda terus memburu mereka, dan kadang membunuh ratusan manusia. Hanya beberapa tahun pola kehidupan masyarakat di Afrika Selatan mulai terbentuk, dengan orang kulit putih sebagai tuan, dan orang yang berkulit hitam sebagai pelayan. Warga asli Afrika Selatan atau orang-orang *Boer* semakin terdesak ke pinggir dan mengakibatkan konflik.

Tambang intan di Kimberley pertama kali ditemukan di tahun 1860an. Hal ini bukan membuat Afrika Semakin maju, namun justru sebaliknya. Konflik antara kaum *Boer* dengan Inggris semakin meningkat. Tercatat dua konflik yang besar terjadi antara Boer dan Inggris, yakni di tahun 1880-1881, dan yang kedua di tahun 1899-1902, keduanya dimenangkan oleh Inggris.

Selanjutnya orang *Boer* dan Inggris mengadakan perundingan damai. Salah satu inti kesepakatan tersebut adalah seluruh wilayah akhirnya digabungkan oleh pemerintah Inggris secara bertahap dengan nama "Union of South Africa" dibawah kerajaan Inggris. Dalam konstitusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hak pilih hanya diberikan kepada kaum kulit putih dan laki-laki saja. Orang kulit hitam tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Pada tahun 1913 dikeluarkan undang-undang *Native Land Act*. Inti dari keberadaan undang-undang ini adalah orang kulit hitam dilarang memiliki tanah diluar wilayah yang telah disediakan khusus untuk warga asli. Dimana tanah tersebut biasanya gersang dan tandus dan jauh dari pusat perkotaan. Wilayah tersebut dikenal dengan *homeland* dan *Bantustan* atau wilayah pemukiman khusus orang kulit hitam. Tidak hanya hak untuk memiliki tanah, bahkan untuk menyewa tanah milik orang kulit putih pun dilarang. Peraturan inilah yang kemudian menjadi pilar utama politik Apartheid dalam menjalankan dominasi politik kulit putih terhadap kulit hitam, yang dikukuhkan dengan konstitusi 1910.

Penderitaan penduduk asli kulit hitam diperparah dengan dikeluarkannya *Urban Area* pada tahun 1923, dimana inti dari peraturan tersebut adalah warga kulit hitam dilarang tinggal di wilayah perkotaan, kecuali untuk bekerja bagi kepentingan kaum kulit putih. Minoritas kulit putih menguasai 86% tanah di Afrika Selatan, sedangkan mayoritas masyarakat kulit hitam hanya diberikan 14% tanah, itupun merupakan tanah yang kurang subur untuk pertanian. Akibatnya masyarakat kulit hitam menjadi masyarakat nomor dua di negri nya sendiri.

Selain itu *Civilized Labour Policy* juga semakin menyudutkan posisi warga asli kulit hitam. Dimana dalam berbagai jabatan orang kulit hitam harus digantikan oleh kaum kulit putih. Akhirnya pada tahun 1948, pemerintah saat itu melakukan segregasi/ pemisahan resmi antara orang kulit hitam dan kulit putih, yang kemudian dikenal dengan nama "Politik Apartheid".

Kata Apartheid berasal dari bahasa Afrikaans. Menurut Dennis Worrell, Apartheid adalah campuran anatara ajaran Calvinis dengan praktek- praktek colonial, yang pada intinya mengajarkan bahwa; Setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan pada dunia. Untuk maksud itu maka ras- ras tersebut harus dipisah satu sama lain dengan membatasi kontak antar ras, agar masing- masing dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadianya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Samsumar Dam. *Op.Cit.*, hal.12

Pemisahan tempat tinggal berdasar warna kulit pun terjadi, keluarga kulit putih tinggal di lingkungan sendiri dalam kota-kota baru, sedangkan orang kulit hitam tinggal di daerah yang agak jauh dari pemukiman orang kulit putih. Orang kulit hitam tinggal di daerah yang penuh sesak, dimana kemiskinan dan penyakit merajalela, karena kurangnya air bersih dan tempat pembuangan limbah.

Undang-undang tersebut kemudian diikuti lagi oleh Undang-undang Rasial lainnya seperti;

- 1) UU Larangan untuk Kawin Campur antar Ras(1949), dan bahkan dengan UU Ammoralias pemerintah kulit putih mengatur larangan hubungan sex antar ras; *The Separte Amenities Act*, yang membedakan standart fasilitas umum antar ras.
- 2) UU Registrasi Penduduk (1950)

Pemerintah saat itu merasa alat yang paling tepat untuk dapat mengontrol orang kaum kulit hitam adalah dengan “pas jalan” atau tanda pengenal sesuai dengan ras nya masing- masing. Artinya semua orang kulit hitam harus membawa sebuah dokumen yang mencatat izin bagi mereka untuk berada di kota. Setiap Polisi juga berhak untuk menghentikan orang kulit hitam dan memeriksa dokumen yang dibawa, jika terbukti tidak membawa “pas jalan, Polisi berhak untuk mempenjarakan orang tersebut.

### 3) UU Otorita Bantu (1950)

Pemerintah menghapuskan Dewan Perwakilan Penduduk Asli kulit hitam, kemudian menggantinya dengan sistem hirarki. Dimana masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang telah ditunjuk oleh pemerintah kulit putih.

### 4) UU Pendidikan Bantu (1953)

Pemerintah menempatkan pengawasan pendidikan masyarakat kulit hitam berada di bawah Departemen Urusan Penduduk Asli. Selain itu pemerintah juga mengambil alih sekolah-sekolah warga kulit hitam yang dulunya dikelola oleh Gereja dan misionaris.<sup>21</sup>

## **B. Olah Raga dan Sepakbola Di Afrika Selatan Masa Apartheid**

Tahun 1956 pemerintah Afrika Selatan memperketat undang-undang olahraga. Siapapun yang terlibat dalam pertandingan olahraga yang mencampurkan kedua ras akan dihukum. Hanya warga kulit putih saja yang berhak mewakili Afrika Selatan dalam turnamen olahraga internasional.

Setiap ras memiliki persatuan olahraganya sendiri. Olahragawan dunia berkulit hitam seperti petenis Amerika Serikat Arthur Ashe mendapat larangan masuk ke Afrika Selatan dan ketika timnas Kriket Inggris yang diperkuat pemain berkulit

---

<sup>21</sup>Samsumar Dam, *Op.Cit.*, hal, 13- 14

hitam Brasil D'Oliveira pada 1968 melakukan tur di Afrika Selatan, PM John Vorster melarang penyelenggaraan turnamen tersebut.

Dunia Internasional saat itu bereaksi keras. Perserikatan Bangsa Bangsa menyerukan seluruh negara untuk memboikot turnamen olahraga yang digelar di Afrika Selatan dan membentuk komisi pengawasan. Sebuah daftar hitam dibuat untuk mencatat setiap olahragawan yang tampil di Afrika Selatan, termasuk di antaranya bekas pembalap Formula 1 Niki Lauda.

Komite Olimpiade Internasional (IOC) melarang keikutsertaan Afrika Selatan pada Olimpiade Tokyo (1964) dan di Mexiko (1968). Tahun 1970 organisasi tersebut mengeluarkan Afrika Selatan dari keanggotaannya. Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) juga mengeluarkan Afrika Selatan dari keanggotaannya pada tahun 1964 dan 1976.

Ketika 1976 pemerintah Selandia Baru mengizinkan tur tim nasional kriket Afrika Selatan di negaranya, sekitar 30 negara-negara Afrika dan Asia mengancam akan membatalkan keikutsertaannya pada Olimpiade di Montreal lantaran IOC menolak mengancam kebijakan Selandia Baru. Sejumlah atlet kulit hitam, seperti pelari Marathon Zola Budd, terpaksa pindah kewarganegaraan untuk menghindari isolasi internasional.



Semua itu berujung pada kemunduran olahraga Afrika Selatan dan menciptakan tekanan besar terhadap pemerintahan kulit putih.

Sepak bola di Afrika Selatan juga minim prestasi, selain karena olahraga ini tidak begitu populer di Afrika Selatan dibandingkan rugby dan kriket, dicoretnya keanggotaan Afrika Selatan dari daftar anggota FIFA mempersulit gerak team nasional sepakbola mereka. Buruknya persepakbolaan Afrika Selatan pada masa Apartheid dapat dilihat dari data berikut;

**TABEL 2 KEMUNDURAN SEPAKBOLA AFRIKA SELATAN SELAMA MASA APARTHEID (1948-1994)<sup>22</sup>**

Tahun Terjadi	Prestasi	keterangan
1948-1962	Piala Dunia	Tidak ikut
1957	Piala Afrika	Di diskualifikasi karena masalah Apartheid.
1966-1990	Piala Dunia	Dicoret dari FIFA
1959-1992	Piala Afrika	Dihukum dari CAF
1994	Piala Afrika	Tidak lolos seleksi
1994	Piala Dunia	Tidak lolos seleksi

Sumber diolah dari : [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Dari tabel di atas, terlihat, betapa kemunduran yang dialami oleh team nasional sepakbola Afrika selatan. Sanksi bermain di kancah Internasional tidak hanya datang dari FIFA, tapi juga dari induk organisai sepakbola Afrika CAF.

<sup>22</sup> Tim Nasional Sepakbola Afrika Selatan. From [http://id.wikipedia.org/wiki/Tim\\_nasional\\_sepak\\_bola\\_Afrika\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tim_nasional_sepak_bola_Afrika_Selatan). 11 Maret 2011.

### C. Perekonomian Afrika Selatan Masa Apartheid

Secara garis besar, perekonomian Afrika Selatan masa apartheid adalah produk kumulatif dari setidaknya tiga aktivitas utama ekonomi Afrika Selatan; pertanian, pertambangan, manufaktur. Warga kulit putih menguasai kurang lebih 86% dari total tanah di Afrika Selatan. Sisanya, kurang lebih 14% dikuasai oleh warga asli. Tanah yang dikuasai oleh warga asli tersebut bersifat tandus dan tidak dilalui saluran irigasi.

Akibat undang-undang kepemilikan tanah selama masa Apartheid tersebut, sektor pertanian dikuasai oleh kaum kulit putih. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Afrika Selatan saat itu. Diantaranya adalah *white Paper on Agriculture Policy*. Tahun 1984 inti dari kebijakan ini adalah pencapaian swasembada pangan, sandang dan persediaan bahan-bahan mentah untuk industri lokal pada tingkat harga yang memadai.

Pada sektor industry, sejak batu pertama ditemukan di Orange River pada tahun 1867 dan emas di Witwatersrand pada tahun 1884 Afrika Selatan mengalami transformasi awal dari pertanian tradisional ke arah industri pertambangan. Afrika Selatan mengalami eksploitasi pertambangan hampir di seluruh wilayah. Permata dan emas menjadi sumber kesejahteraan baru masyarakat Afrika Selatan. Perkembangan ini mampu menarik investasi asing, imigran, manufaktur, serta transportasi ke daerah pedalaman.

Permodalan dan pekerja terdidik terlatih berasal dari kaum kulit putih, sedangkan warga kulit hitam ada di sektor pekerja tidak terdidik dan terlatih serta murah. Bahkan, ketersediaan pekerja kulit hitam tetap terjamin dalam jumlah yang sangat besar dan murah.

Fasilitas publik di Afrika Selatan, tidak banyak berkembang selama masa Apartheid. Termasuk masalah fasilitas olahraga, khususnya fasilitas stadion sepakbola. Inggris, bekas koloni Afrika Selatan itulah yang memperkenalkan sepak bola di sana. Olah raga ini populer terutama di kalangan penduduk kulit hitam. Tapi rezim apartheid tidak mengucurkan banyak uang untuk sepak bola. Pemerintah waktu itu lebih suka melengkapi fasilitas untuk rugby dan kriket, olahraga yang populer di kalangan kulit putih.<sup>23</sup> Sehingga wajar apabila di Afrika Selatan masa Apartheid tidak memiliki sarana sepakbola, sebab semua anggaran perekonomian semuanya dikuasai oleh rejim kulit putih.

#### **D. Kehidupan Sosial Masyarakat Afrika Selatan Masa Apharteid**

Dalam hal pendidikan, UU Pendidikan Bantu (1953) dimana pemerintahan kulit putih menempatkan pengawasan pendidikan masyarakat kulit hitam berada di bawah Depertemen Urusan Penduduk Asli. Selain itu pemerintah juga mengambil alih sekolah- sekolah warga kulit hitam yang dulunya dikelola oleh Gereja dan misionaris.

---

<sup>23</sup>Bakat Sepakbola Afrika Selatan Kurang Mendapat Perhatian. From, <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/bakat-sepak-bola-afsel-kurang-perhatian>. 10 Maret 2011.

Undang-undang dalam sektor pendidikan inilah yang semakin menurunkan kualitas masyarakat kulit hitam dibandingkan dengan masyarakat minoritas kulit putih. Hal ini disebabkan pemerintah tidak hanya memisahkan sekolahnya saja, melainkan juga pendidikan khusus untuk para kulit hitam. Berada di bawah departemen yang berbeda, kulit hitam dibawah departemen urusan pribumi, sedangkan kulit putih berada di bawah Departemen Pendidikan, mengakibatkan berbeda pula anggaran yang di berikan untuk pendidikan. Dalam kurun waktu 1954- 1965 kulit hitam hanya mendapat anggaran dana 4,9 Rand (Rp. 3802) sedangkan kulit putih 74 Rand ( Rp. 47.175) atau lima belas kali lipat lebih besar. Dengan Undang-undang pendidikan yang diskriminatif ini, berdampak pula dengan jumlah guru yang mengajar yang awalnya satu orang guru mengajar untuk 40 siswa, menjadi satu guru untuk 50 siswa di tahun 1960. Sehingga dampaknya begitu terlihat dari jumlah warga kulit hitam yang dapat melanjutkan ke universitas, di tahun 1953 terdapat 253 siswa kulit hitam yang masuk perguruan tinggi. Tahun 1961 menurun menjadi 115 siswa yang bisa melanjutkan ke universitas.<sup>24</sup>

Hal ini dapat dilihat dari warga kulit hitam yang merasa minder ketika bertemu dengan elit kulit putih, selain itu ketrampilan komunikasi serta pemahaman yang mereka miliki sangat lemah. Sehingga kualitas sumber daya manusia kulit hitam lebih rendah dibandingkan kulit putih.

---

<sup>24</sup> [http://Kompas\\_online/10/mei/1994.html](http://Kompas_online/10/mei/1994.html)

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kulit hitam. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat kulit hitam yang sebagian besar tinggal di pemukiman kumuh, sanitasi yang buruk. Virus HIV AIDS juga banyak menyerang Afrika Selatan. bahkan Afrika Selatan pernah dinobatkan sebagai negara dengan penderita AIDS terbesar di dunia. Dimana hampir 11% warga nya positif mengidap virus mematikan tersebut. Artinya satu dari lima penduduk Afrika Selatan terjangkit virus ini. Warga kulit hitam banyak mengidap virus ini selain karena kebiasaan hidup yang kotor, dan juga tingkah laku seksual yang tidak aman.<sup>25</sup>

Dalam hal tindakan kriminal masyarakat selama masa apartheid dan masa transisi menuju sistem baru yang demokratis, terjadi banyak kerusuhan yang berakibat banyaknya korban jiwa yang meninggal. Kerusakan dan kekerasan ini bersumber pada ketidakadilan dan kesenjangan antara warga mayoritas kulit hitam dan minoritas kulit putih. Para kaum kulit putih walaupun dari segi jumlah minoritas, namun mereka memiliki aparat keamanan yang bersenjata lengkap, termasuk bisa memenjarakan siapa saja yang dianggap melawan rezim kulit putih. Termasuk yang dipenjarakan adalah tokoh nasional Afrika Selatan, Nelson Mandela.

Tahun 1955, kelompok- kelompok rasial yang menentang Apartheid, seperti ANC (*Afriacan National Congress*), SAIC, CPO (*Coloured Peoples Plitical Organization*), COD (*white Congrres of Democrats*) mengadakan pertemuan di

---

<sup>25</sup>Kebangkitan Nasional Afrika Selatan yang Kedua. From <http://bataviase.co.id/node/250007> 10 maret 11

Kliptown (dekat Johannesburg) guna menyusun suatu *Freedom Charter*, yang menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis non rasial.<sup>26</sup> Pertemuan tersebut mendapat respon dari pemerintahan minoritas kulit Putih dengan menangkap 156 orang pemimpin gerakan itu dengan tuduhan berkomplot untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Hal ini tidak lantas menyurutkan kaum penentang Apartheid untuk terus berjuang, meskipun pemimpin mereka ditangkap oleh pemerintah. Lewat PAC (*Pan African Congress*) mereka terus berjuang, salah satunya dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran di Sharpeville pada tanggal 21 Maret 1960. Demonstrasi itu diwujudkan dengan pembakaran tanda pengenalan (*Pass Way*) di depan kantor polisi, dan polisi tidak diam saja mereka melakukan perlawanan dengan senjata sehingga banyak demonstran yang tewas.

Peristiwa pembantaian ini banyak dikecam oleh masyarakat Internasional berupa boikot dan pancabutan investasi ke negara lain. Aksi para kulit hitam ini memaksa pemerintah kulit putih mengeluarkan Undang-Undang Darurat dan menyatakan ANC dan PAC sebagai organisasi terlarang, dan lagi-lagi para pemimpinnya ditangkap. Menanggapi sikap para kulit putih tersebut ANC tidak diam saja, justru membentuk kekuatan militer yang bernama "Umkhonto we Sizwe (MK)" atau Tombak Bangsa yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Sedangkan PAC pun juga membentuk sayap militer dengan nama "poqo" pada tahun 1962. Kedua kelompok ini melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi kaum kulit hitam.

---

<sup>26</sup>Kirdi Dipoyudo, *Afrika Dalam Pergolakan 2*, CSIS, Jakarta, 1983, hal 81

Pada bulan Juni 1976 pemukiman warga kulit hitam dilanda kekerasan. Peristiwa ini bermula ketika warga di Soweto (South-west Town) melakukan aksi protes menentang kenaikan tarif bus dan penggunaan bahasa Afrikaner di sekolah-sekolah. (Bahasa Afrikaner adalah bahasa yang dikembangkan dari bahasa Belanda) Karena penggunaan bahasa ini melambangkan dominasi kulit putih di Republik Afrika Selatan. Aksi ini mengakibatkan banyak warga kulit hitam terbunuh.<sup>27</sup>

Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan juga berangkat dari kaum buruh. Pada tahun 1973 dimana para buruh tambang melakukan aksi mogok yang mengakibatkan lumpuhnya sektor pertambangan dan industri di Afrika Selatan. Seperti aksi-aksi serupa lainnya, aksi para buruh ini menuntut adanya persamaan hak. Aksi ini berubah menjadi kriminal sebab para buruh yang melakukan aksi, melakukannya dengan cara-cara kekerasan. Dari tahun 1973- 1979 tercatat banyak kerusakan yang serius pada tambang-tambang di seluruh Afrika Selatan akibat aksi mereka, dan lebih dari 200 pekerja tewas serta lebih dari 1000 pekerja lainnya cedera.<sup>28</sup>

Hubungan antar ras di Afrika Selatan telah menjadi topik pembicaraan dalam hampir setiap sidang umum PBB sejak tahun 1952. Namun PBB baru berhasil mengeluarkan pernyataan dalam bentuk resolusi pada awal tahun 1960 seiring dengan semakin meningkatnya konflik rasial yang terjadi di dalam negeri Afrika Selatan.

---

<sup>27</sup> Ringkasan Peristiwa, *Indonesia dan Dunia Internasional*, CSIS, Jakarta 1977, hal. 638.

<sup>28</sup> J. Leger, P. van Niekerk, "Organizing on the mines: the NUM phenomenon", *South African Review* 3, Rava Press, Johannesburg, 1986, hal. 68

Menyusul terbunuh nya 64 orang kulit hitam dalam suatu tragedy di Sharpsville, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi S/4300, berisi himbauan bagi pencabutan sistem Apartheid. Walaupun tidak mendapat dukungan dari Inggris dan Prancis. Dari tahun 1946 sampai 1984, Sidang Umum PBB telah mengeluarkan tidak kurang dari 215 resolusi, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan konflik rasial di Afrika Selatan.<sup>29</sup>

Kemudian di tahun 1962, melalui Sidang Umum PBB, untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu resolusi yang berisi himbauan untuk membekukan semua hubungan dagang dan transportasi terhadap Afrika Selatan oleh semua anggota PBB. Kemudian satu tahun setelah nya di tahun 1963 ditambah lagi dengan himbauan pelaksanaan embargo minyak, pemutusan hubungan diplomatik dan merekomendasikan sanksi ekonomi.

Pada tahun yang sama yakni 1963 Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menghimbau semua Negara untuk menghenikan hubungan militer mereka dengan Afrika Selatan. tepatnya pada bulan December 1963 PBB secara resmi menerapkan sanksi terhadap Afrika Selatan untuk membekukan pengiriman perlengkapan militer ke Afrika Selatan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Gary Clyde Hufbauer, *Economic Sanctions Reconsidered*, Washington DC, Institute for International Economic, 1985, hal 346

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 348



Akhirnya pada tahun 1974, keanggotaan Afrika Selatan di dalam Sidang Umum PBB dicabut, karena tidak mengindahkan isi resolusi-resolusi yang menuntut dihapusnya Apartheid. Kedudukannya di dalam Sidang Umum PBB diberikan kepada dua organisasi kulit hitam terbesar yakni ANC dan PAC.<sup>31</sup>

Pada Tahun 1989 menandai dimulainya proses yang menjanjikan penghapusan sistem Apartheid melalui jalur perundingan tidak lagi melalui jalur demonstrasi dan kekerasan. Di dalam negeri sendiri terjadi pergeseran cara yang dipakai dalam memperjuangkan persamaan hak oleh warga kulit hitam. Dimana mulai terjadi perubahan bentuk perjuangan anti Apartheid yang lebih menuntut pelaksanaan perundingan untuk mencapai tujuannya. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi pula perubahan cara berfikir pada partai yang berkuasa, yang mulai berani mengakui kegagalan Apartheid dan memandang perlunya perubahan konstitusional.<sup>32</sup>

Di bawah kepemimpinan Botha (1978- 1989), pemerintah Afrika Selatan telah menghapus beberapa petty Apartheid seperti *Prohibition of Mixed Marriages Act*, *Immorality Act*, dan *Pass Way*. Perubahan-perubahan tersebut belum dianggap berarti karena masih tetap belum menyentuh pilar-pilar dasar Apartheid. Pada Januari 1989 Botha mengundurkan diri dari tugasnya dengan alasan kesehatannya, kemudian posisinya digantikan oleh F.W. de Klerk. Terpilihnya Klerk sebagai presiden kemudian semakin mempercepat proses perubahan yang terjadi.

<sup>31</sup>World Conference on Sanctions against Racist South Afrika, op.cit, hal 123

<sup>32</sup>*Progress Made in the Implementation of the Declaration on Apartheid and Its Destructive Consequences in South Afrika*, Report of the secretary- General, U.N Juli 1990, hal,5

Perubahan yang berkembang kemudian mendapat dukungan dari dunia internasional baik di lingkup negara-negara Afrika melalui OAU, Gerakan Non Block, maupun dari PBB. Pada akhir tahun 1989, Presiden de Klerk mengeluarkan pernyataan tentang akan dilaksanakannya beberapa tindakan yang bertujuan untuk menciptakan persamaan hak bagi semua orang dalam setiap aspek kehidupan, baik konstitusioanal, sosial maupun ekonomi. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembebasan tahanan politik, pencabutan hukuman mati, pencabutan beberapa peraturan darurat, dan juga peraturan yang membatasi pembatasan gerak individu di Afrika Selatan.

Untuk mengikis habis sistem Apartheid di Afrika Selatan, Klerk mencabut tiga undang-undang yang menjadi pilar utama Apartheid. Yakni;

- 1) Undang-Undang pemisahan daerah (*Groups of Area Act*) tahun 1950, dimana peraturan ini mengatur tentang wilayah pemukiman warga kulit hitam dan warga kulit putih.
- 2) Undang-Undang pertanahan (*Land Act*) tahun 1913 dan 1936, dimana peraturan ini mengatur tentang kepemilikan tanah warga kulit hitam dan putih.
- 3) Undang-Undang pendaftaran kependudukan (*Population Regristrations Act*) tahu 1950, dimana peraturan ini mengatur tentang klasifikasi masyarakat berdasar warna kulit.

### **E. Afrika Selatan Ketika Perang Dingin dan Setelah Perang Dingin**

Perang dingin bermula setelah Perang Dunia II berakhir, kekuatan Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa Barat, antara lain Inggris dan Perancis, mengalami ketegangan dengan mantan sekutunya Uni Soviet. Mereka terbagi dalam dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Baik Blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang mengusung kapitalisme maupun Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan Komunisme saling berebut pengaruh secara global, dengan berupaya menarik negara-negara lainnya untuk masuk ke dalam kelompoknya, atau setidaknya mencegah agar negara-negara tersebut tidak memihak kepada blok musuh.

Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya saat itu menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya tersebut. Tidak mengherankan munculah blok-blok aliansi yang lebih didasarkan pada persamaan ideologis. Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer. Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini demikian intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat dihindarkan lagi, karena dengan jalan menumpuk kekuatan nuklir itulah jalan terakhir menyelamatkan ideologinya. Ketegangan ini dikenal dengan Perang Dingin (*Cold War*).

Perang Dingin (1949-1989) itu sendiri terbagi pada beberapa tahap perkembangan sesuai dengan realitas hubungan antar bangsa. Secara politis Perang Dingin terbagi atas tahap 1947-1963 dengan beberapa puncak peristiwa seperti Blokade Berlin 1949, Perang Korea 1950-1953, Krisis Kuba 1962 dan Perjanjian Proliferasi Nuklir 1963. Selanjutnya selama Perang Vietnam 1965-1975, paradigma Perang Dingin terbatas pada persaingan berkelanjutan antara AS dan Uni Soviet di beberapa kawasan strategis dunia.

Perang dingin ini berakhir salah satunya ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat yang nonkomunis dengan Jerman Timur yang komunis di tanggal 9 November 1989. Serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 1990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin tersebut dan bubarnya Uni Soviet, maka Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya.

Walaupun dinamakan Perang Dingin karena kedua negara adidaya, AS dan Uni Soviet, tidak pernah terlibat konflik terbuka, pada kenyataannya Perang Dingin menyulut banyak peperangan terbuka di Dunia Ketiga. Negara-negara berkembang diperlakukan sebagai bidak-bidak atau *proxy* oleh negara-negara besar sehingga

mempertajam konflik antar negara maupun intranegara berdasarkan perbedaan ideologi.<sup>33</sup>

Selama perang dingin berlangsung, peran Afrika Selatan cukup besar karena mendominasi bahan-bahan mineral untuk keperluan teknologi tinggi yang sangat dibutuhkan oleh kedua negara adikuasa yang sedang bersaing.

Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa yakni Perang Dingin, melahirkan realitas baru. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasional pun mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.

Setelah perang dingin usai tahun 1989, permintaan akan bahan-bahan mineral yang merupakan komoditi andalan negara Afrika Selatan, dari pelaku perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet pun menurun. Sebagai akibatnya Afrika Selatan dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Pengangguran meningkat yang selanjutnya diikuti naiknya tingkat kriminalitas, kekacauan politik di dalam negeri, dan sosial budaya.

Sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru pasca perang dingin. Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional

---

<sup>33</sup>Haraiankompas.com acses tanggal 31 oktober 2008 pukul 20:00

yang belum jelas, penuh ketidakpastian karena penuh dengan kompetisi. Kedua, yakni soal keamanan regional. Fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini. Ketiga, sorotan dunia jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional.

Perhatian keempat terpusat pada apa yang dinamakan sebagai "3 in 1" yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi. Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu ini sangat dominan dalam pemberitaan pers internasional. Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang.

Penekanan Barat terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) mempengaruhi Hubungan Internasional pasca Perang Dingin. Isu-isu HAM menyangkut soal upah, kondisi bekerja, serikat buruh, standar hidup, hak-hak wanita dan anak-anak, hiburan dan waktu cuti, keamanan dan tunjangan sosial serta lingkungan. Pemaksaan dari Barat untuk menentukan standar HAM yang seharusnya dilaksanakan negara-negara di Asia misalnya.

Sedangkan Aryeh Neier, Direktur *Human Rights Watch*, menyebutkan lebih spesifik nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia. Ia antara lain menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari,

persamaan ras, etnik, agama atau gender. Hal-hal ini ikut menentukan pola hubungan antar negara.

Masalah yang menyangkut hak asasi manusia akan memberikan dampak terhadap politik luar negeri suatu negara. Hal itu juga berarti bahwa hubungan antara satu kekuatan politik dengan yang lain, akan di ikuti oleh masalah HAM.

Dalam kasus HAM dan juga demokratisasi sebagai contoh dapat dilihat bagaimana Uni Eropa dan Amerika Serikat bersikap terhadap Myanmar. Negeri yang pernah melakukan pemilu tahun 1990 yang dimenangkan Liga untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi ini terpaksa harus hidup dalam situasi darurat terus menerus. Untuk menjaga keadaan darurat itu, militer Myanmar membentuk apa yang dinamakan Dewan Pemulihan Hukum Negara dan Ketertiban (State Law and Order Restoration Council) SLORC. Sampai tahun 1997, SLORC masih bertahan atas nama ketertiban negara. Melalui Konvensi Nasional sedang disusun konstitusi yang kemudian akan melahirkan pemilihan umum.

Di Afrika Selatan sendiri, bagaimana kaum kulit berwarna yang merupakan warga keturunan Inggris & Belanda, memperlakukan penduduk asli Afrika yang berkulit hitam dengan semena-mena, bahkan membuat suatu undang-undang (apharteid) yang menentukan hak seseorang semata-mata hanya berdasarkan pada warna kulit, dan kulit hitam yang notabene penduduk asli dan merupakan mayoritas dirugikan dengan undang-undang ini. Keadaan semakin parah ketika warga kulit

hitam mulai menginginkan perubahan di Afrika Selatan, namun dengan cara-cara kekerasan. Sampai akhirnya melalui partai ANC undang-undang tersebut di hapus dan tahun 1994 melahirkan pemilu multi rasial pertama kali di Afrika Selatan, yang dimenangkan warga lokal berkulit hitam, Nelson Mandela.